



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Oktober 2025 sampai 31 Desember 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,96 / 98,98%

Jumlah	203 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 88	
	PEREMPUAN : 115	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	SD : 6	Diploma 2 : 0
	SMP : 17	Diploma 3 : 1
	SMU : 81	S1 : 91
	Diploma 1 : 0	S2 : 6
		S3 : 1
Pekerjaan	PNS : 30	SWASTA : 19
	TNI : 0	WIRAUSAHA : 3
	POLRI : 3	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 148	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	3,892
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	3,906
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNPB)	3,916

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Bahwa pengguna layanan selalu mendapatkan informasi tentang tarif/biaya yang dapat diakses dengan mudah baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan, sehubungan biaya juga sudah ada tertera dimeja pelayanan dan diberikan informasi yang jelas oleh petugas PTSP dan tindak lanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Simalungun memperbaharui nilai biaya segera setelah ada ketentuan perubahan atas tarif dan biaya tersebut.
2. Bahwa petugas PTSP sudah berkomitmen memberikan pelayanan yang gratis dan transparan dan tidak pernah ada biaya tambahan sesuai dengan amanat Pimpinan Pengadilan Negeri Simalungun yang selalu diingatkan pada saat apel dan super visi pada PTSP Pengadilan Negeri Simalungun. Bahwa pengguna layanan yang pernah dihubungi oleh seseorang (Pegawai Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara dapat membuat laporan/ pengaduan secara online melalui aplikasi siwas dan link akses ditampilkan diruang PTSP ataupun pengaduan secara langsung ke Pengadilan Negeri Simalungun.
3. Bahwa pengguna layanan selalu mendapatkan bukti transaksi keuangan/ pembayaran yang sah secara transparan berupa kuitansi pembayaran PNPB sesuai dengan tarif yang berlaku.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

6 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri